

BAB II

Landasan Teori

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori dan kajian yang digunakan dalam penelitian. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian.

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, Miyasto dan Noor Rahardjo telah melakukan penelitian yang membahas tentang Perundang-undangan ketaatan membayar cukai, dalam penelitiannya yang berjudul IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)

Edo Puja Pradana telah melakukan penelitian yang membahas tentang pengawasan peredaran rokok, dalam penelitiannya yang berjudul PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU

Masgirang Romadhon, Mochammad Al Musadieg dan Sri Sulasmiyati telah melakukan penelitian yang membahas tentang evaluasi pengumutan cukai hasil tembakau, dalam penelitiannya yang berjudul EVALUASI PENGUMUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

Pembahasan pada penelitian ini membahas permasalahan dalam ruang lingkup barang kena cukai dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Cukai secara umum

Cukai diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undangundang. Barang-barang tertentu yang dimaksud dalam UU Cukai tersebut mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Menurut Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, Miyasto dan Noor Rahardjo “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UndangUndang Cukai” .

Menurut Edo Puja Pradana Cukai secara umum didefinisikan sebagai pajak khusus yang dikenakan terhadap penjualan atau penggunaan barang dan jasa tertentu yang diproduksi di dalam negeri atau impor, dihitung berdasar unit barang (*spesifik*) atau persentase (*advolorum*) atau kombinasi dari keduanya. Dalam pengertian ini cukai bersifat diskriminatif karena hanya dikenakan atas barang atau jasa tertentu dan pengenaannya dapat sebagai tambahan atas pajak lainnya yang telah dipungut, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sedangkan menurut Masgirang Romadhon, Mochammad Al Musadieg dan Sri Sulasmiyati, Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Pasal 23 A Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak termasuk cukai oleh negara yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasannya tersebut disebutkan: “Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pungutan cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pembangunan nasional yaitu merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu terhadap kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Cukai sebagai sumber penerimaan negara mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Penerimaan negara di sektor cukai mempunyai peranan atau kontribusi yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya dalam kelompok penerimaan perpajakan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Besarnya cukai rokok tersebut memang memberikan beberapa keuntungan bagi perekonomian negara. Pertama, cukai rokok yang besar ini menjadi sumber dana APBN untuk membiayai kebutuhan masyarakat, baik dalam penyediaan barang publik seperti infrastruktur maupun pelayanan publik, misalnya dana

operasional institusi pemerintah. Kedua, ketergantungan APBN pemerintah terhadap cukai rokok mendorong industri rokok untuk tetap bertahan, bahkan seolah-olah diupayakan untuk semakin membesar. Dengan demikian, secara tidak langsung industri rokok yang padat karya ini menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi Indonesia yang terjerat dengan masalah pengangguran.

Dari keuntungan penerimaan cukai yang telah dijabarkan di muka, cukai rokok sepertinya memang memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini membuat fungsi cukai rokok bergeser dari tempatnya semula. Pada amandemen Undang-Undang Cukai yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pemerintah bersama dengan DPR mencoba untuk meluruskan kembali filosofi cukai yang sebelumnya tidak tepat, dimana pengenaan cukai pada suatu produk hanya dilihat sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi negara.

Fungsi utama atau filosofi cukai harus diluruskan, cukai memiliki fungsi regulater yaitu untuk mengatur, menghalangi atau mengurangi dan mengawasi peredaran dan penggunaan objek cukai secara bebas. Intinya, fungsi cukai adalah membatasi dan mengurangi konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial yaitu salah satunya bahaya rokok bagi kesehatan. Penerimaan negara dari sektor cukai merupakan konsekuensi yang harus dijalankan dari maksud pengenaan cukai, seperti untuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan bahan baku, kesehatan dan lainnya.

Barang Kena Cukai yaitu barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaian dari barang kena cukai bisa menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakainya harus dibebankan pengumutan Negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang Kena Cukai terdiri atas:

1. Etil alkohol atau Etanol (EA) dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil Tembakau (HT), meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - a. Sigaret merupakan hasil tembakau yang diolah dari tembakau ranjangan dibalut oleh kertas dengan cara dilinting, sigaret terdiri dari:
 - 1) Sigaret kretek yaitu sigaret yang dibuat dengan campuran cengkeh asli atau tiruan.
 - 2) Sigaret putih yaitu sigaret yang dibuat tidak dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan.
 - 3) Sigaret kelembak kemenyan yaitu sigaret yang dibuatnya dengan campuran kelembak atau kemenyan asli atau tiruan.
 - b. Cerutu merupakan hasil tembakau yang diolah dari lembaran lembaran daun tembakau miris atau tidak, kemudian digulung dengan daun tembakau.
 - c. Rokok daun merupakan hasil tembakau yang diolah dengan daun nipah, daun jagung atau sejenisnya kemudian dilinting.
 - d. Tembakau iris merupakan hasil tembakau yang diolah dengan daun tembakau yang dirajang.

2. Tentang Bea dan Cukai

Pengertian Bea merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor serta diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat ataupun juga karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan serta juga yang mengurus mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan sebutan **Kepabeanan**. Pengertian kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau pun keluar daerah pabean serta juga pemungutan bea masuk.

Dalam melakukan kepabeanan tersebut, juga memiliki lokasi tertentu. Daerah pabeanan pada wilayah RI yang terdiri dari wilayah barat, perairan serta ruang udara di atasnya serta juga tempat-tempat tertentu seperti yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif serta juga landas kontinen yang di dalamnya berlaku sebuah undang-undang (UU) ini.

Kawasan mengenai Pabean merupakan suatu kawasan yang mempunyai batas-batas tertentu pada tiap-tiap unit pelabuhan laut, bandar udara, ataupun juga tempat yang sudah ditetapkan ialah sebagai lalu lintas barang yang sepenuhnya itu berada di dalam kawasan pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain dari itu, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai merupakan suatu unsur yang terdiri dari pelaksana tugas pokok dan juga yang mempunyai fungsi Departemen Keuangan yang berada di bidang kepabeanan & juga cukai. Pabeanan ini tentunya tidak terlepas dari kegiatan atau aktivitas ekspor dan impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk pengertian impor adalah kegiatan atau aktivitas yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Dalam hal tersebut yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan untuk barang yang diekspor adalah bea keluar yang juga dikenakan pungutan negara sesuai yang tentu sesuai Undang-Undang.

Cukai adalah salah satu dari jenis pajak dengan tidak langsung yang pada dasarnya itu mempunyai suatu perbedaan yang cukup mendasar dengan pajak tidak langsung lainnya. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Cukai ini dikenakan terhadap barang tertentu dengan secara selektif. Tujuan dari pengenaan

cukai ialah untuk tiap-tiap jenis barang berbeda-beda sedangkan perihal pajak umumnya itu dikenakan secara umum. Sedangkan untuk tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, sedangkan untuk pajak umumnya itu mempunyai satu tarif untuk seluruh obyek cukai.

Visi Direktorat Jendral Bea dan Cukai ‘ *Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia*’. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Sedangkan misi dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai antara lain ;

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;

c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;

e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan

f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Bea serta Cukai berada dibawah dan juga bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan yang berada pada bidang pengawasan, serta juga penegakan hukum, mengenai pelayanan & juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi tugas pokok Bea dan Cukai diantaranya;

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

